

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

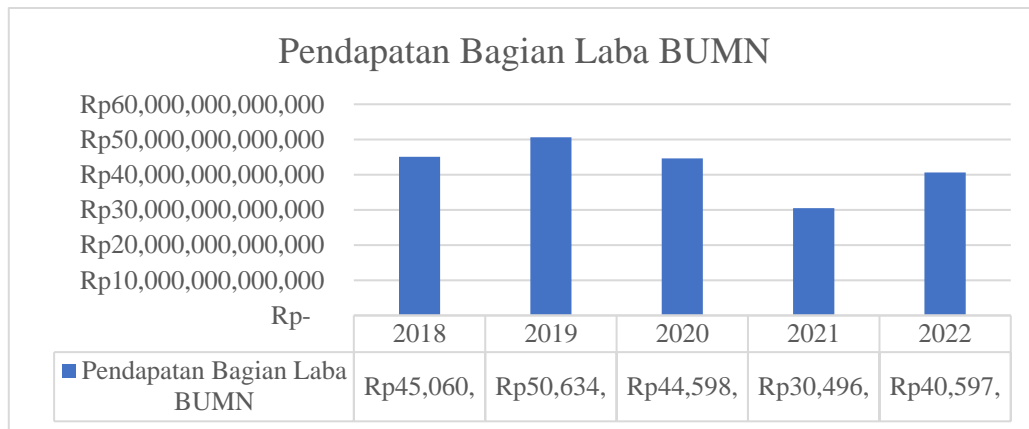
### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

BUMN atau biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh negara serta bergerak di berbagai sektor perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Terbuka, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari berbagai kekayaan negara. Pada dasarnya BUMN memiliki tiga tujuan utama yaitu sebagai stabilisator ekonomi, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, serta sebagai suatu unit usaha yang harus tetap mampu mendapatkan laba (Kirmizi, 2009).

BUMN mempunyai peranan penting dalam berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara berperan dalam pembangunan Indonesia, seringkali mendorong pembangunan infrastruktur, menciptakan berbagai sektor, dan bahkan membantu program pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menurut Idris (2023) berikut merupakan jenis-jenis perusahaan BUMN berdasarkan statusnya. BUMN yang berstatus PT atau Persero, seperti halnya perusahaan swasta, sebagian besar perusahaan publik berbentuk perseroan terbatas atau perseroan terbatas. Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT memiliki saham minimal 51 persen dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengambil keuntungan. Selanjutnya ada BUMN yang berstatus Perum, saat ini Perum BUMN merupakan perseroan yang seluruh modalnya dimiliki negara dan sahamnya tidak dimiliki pihak ketiga. Misi Perum BUMN adalah menyediakan produk dan jasa yang diinginkan atau didukung oleh banyak orang. Dan yang terakhir ada BUMN berstatus Perjan, perjanjian merupakan salah satu jenis badan usaha milik negara milik pemerintah yang mempunyai misi menyelamatkan nyawa orang banyak dan bukan mencari keuntungan. Keuntungan perusahaan diperbolehkan jika tidak mengganggu tujuan utamanya yaitu

melayani masyarakat dan bukan merupakan tujuan utamanya. BUMN tergantung pada jenis usahanya.

Selain itu, Idris (2023) juga menambahkan pembagian perusahaan BUMN berdasarkan sektornya yang terdiri dari kesehatan, transportasi, konstruksi, pertambangan, perikanan, keuangan, pertanian, konstruksi, dan lain-lain. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sedang membentuk klaster unit usaha milik negara, dan banyak perusahaan yang bergabung dalam satu perusahaan induk untuk efisiensi operasional. Klaster utama BUMN adalah: klaster jasa pariwisata dan pendukung, klaster komunikasi dan media, klaster energi, migas, klaster kesehatan, klaster manufaktur, klaster pangan dan pupuk, klaster pertanian dan kehutanan, klaster mineral dan batubara, klaster jasa asuransi dan pensiun, jasa keuangan, jasa infrastruktur dan logistik.



**Gambar 1.1 Pendapatan Bagian Laba BUMN Tahun 2018-2022**

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018-2022*

Berdasarkan gambar grafik diatas, pendapatan bagian laba BUMN tahun 2018 sebesar 45,06 triliun rupiah dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 50,63 triliun rupiah. Pada Tahun 2020 ketika tahun pertama *covid-19* mendapatkan laba sebanyak 44,59 triliun rupiah. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 30,49 triliun rupiah yang merupakan pendapatan bagian laba BUMN terendah. Tahun 2022 mengalami peningkatan laba yang cukup besar menjadi 40,59 triliun rupiah. Menurut

DPR RI pendapatan bagian laba BUMN merupakan bagian pemasukan negara yang berasal dari BUMN. Dengan pendapatan perusahaan BUMN yang tinggi, seharusnya mereka juga memerhatikan lingkungan sekitar dan melaporkan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar yang berlaku. Karena para pemangku kepentingan tidak hanya melihat sebuah perusahaan dari laporan keuangan atau laporan tahunan saja, namun sebagian pemangku kepentingan juga melihat perusahaan dari laporan keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan BUMN dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian untuk mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar di Perusahaan BUMN yang merupakan perusahaan nasional telah melaksanakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mengungkapkan pelaporan dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut ke dalam suatu laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*).

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Seiring berjalannya waktu, perusahaan tidak hanya diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan atau laporan tahunan saja, namun mereka juga ingin dituntut untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan yang mewakili tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan atas aktivitas kerja perusahaan. Menurut Yanti et al. (2021) tanggung jawab sosial semakin menjadi perhatian dalam dunia bisnis. Untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, perusahaan kurang memperhatikan kondisi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat proses produksinya. CSR juga merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap lingkungan sosial demi kelangsungan kerja dan keberlanjutannya (Dewi & Khafi, 2018). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada karyawan ataupun konsumen, namun juga bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perusahaan wajib berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Namun kurangnya kesadaran perusahaan terhadap

CSR dan kurang ketatnya peraturan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR masih sangat kecil, sehingga masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kurangnya kepedulian menjaga lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi seperti banjir dan pencemaran udara merupakan contoh kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Sedangkan kerugian yang terjadi pada lingkungan hidup menghalangi manusia untuk melakukan aktifitasnya karena terhadap oleh kerusakan lingkungan hidup, seperti contoh di atas.

Liputan6.com, Aceh - Rabu 10 Maret 2021, Ketua Badan Kehormatan (BKD) DPR Aceh Sulaiman mengkritisi bantuan negara bersama PT Semen Indonesia, PT Solusi Bangun Andalas (SBA) di media lokal. Dalam 10 tahun terakhir, total CSR perseroan di dua ring area perseroan mencapai Rp30 miliar atau Rp3 miliar per tahun. Jumlah sebesar itu dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sulaiman berharap pihak berwajib mengusut perusahaan tersebut. Beberapa minggu kemudian, ponsel Sulaiman masih menerima pesan dari nomor tak dikenal. Mereka semua punya cerita tentang perusahaan. Cerita ini fokus pada tiga bidang permasalahan. Pertama, pelaksanaan CSR dianggap tertutup. “Baik pemerintah Kabupaten Lhoknga maupun pemerintah Kabupaten Leupung. Padahal, dalam MOU 2009 dan SOP 2012, laporan sudah tersusun dengan jelas, tidak ada laporan yang diberikan kepada Pemerintah Aceh Besar tentang pelaksanaan program CSR, tulis Sulaiman melalui pesan *WhatsApp*”. Dua isu lainnya berkaitan dengan akses terhadap air minum dan biaya tanah. Dalam pertanyaannya kepada media, Sulaiman juga membahas program pembangunan ekonomi negara, yakni pembangunan tambak garam dan penyediaan penggilingan padi. Baik itu program infrastruktur untuk akses air minum, danau garam, atau penggilingan padi, semuanya terhenti. Delapan hari kemudian, PT SBA menyelenggarakan Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) atau *Community Advisory Group* (CAP) di sebuah hotel di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Dalam pertemuan tersebut, *Head of External Relations* SBA, Win Bernadino, memaparkan sejumlah pencapaian CSR perusahaan sepanjang tahun 2012 hingga 2020. Laporan-laporan yang

muncul mengenai pertemuan tersebut umumnya memiliki nama yang sama (Abonita, 2021).

**Tabel 1.1 Pengungkapan CSR Perusahaan BUMN Periode 2018-2022**

No	Nama Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022
1	PT Perusahaan Listrik Negara	0.34	0.37	0.36	0.56	0.89
2	PT Pertamina	0.41	0.64	0.82	0.64	0.89
3	PT Pupuk Indonesia	0.87	0.77	0.87	0.91	0.93
4	Perum Perumnas	0.38	0.34	0.46	0.36	0.36
5	PT Adhi Karya Tbk	0.28	0.38	0.39	0.38	0.51
6	PT Pelayaran Nasional Indonesia	0.45	0.42	0.43	0.43	0.93
7	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	0.35	0.36	0.36	0.37	0.93
8	PT Semen Indonesia Tbk	0.34	0.38	0.51	0.52	0.65
9	PT Wijaya Karya Tbk	0.39	0.63	0.60	0.62	0.71
10	PT Jasa Marga Tbk	0.39	0.48	0.43	0.44	0.50
11	PT Waskita Karya Tbk	0.93	0.91	0.56	0.41	0.48
12	PT Pembangunan Perumahan Tbk	0.34	0.38	0.51	0.52	0.66
13	PT Bank Negara Indonesia	0.30	0.30	0.35	0.56	0.58
14	PT Bank Rakyat Indonesia	0.40	0.38	0.63	0.63	0.60
15	PT Bank Tabungan Negara	0.36	0.43	0.44	0.61	0.70
16	PT Bank Mandiri	0.32	0.41	0.42	0.69	0.69
Rata-rata		0.43	0.47	0.51	0.54	0.55
Rata-rata keseluruhan		0.53				

*Sumber : Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebanyak 16 perusahaan BUMN melaporankan *sustainability report* konsisten selama periode 2018-2022. Namun, dari hasil perolehan data yang dilaporkan oleh perusahaan BUMN tersebut masih tergolong rendah dibandingkan standar yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Standard*. Menurut Putri & Yuliandhari (2020) GRI telah merilis Standards pada tahun 2016 dengan aspek foundation, general disclosure, management approach, dan topic-specific standards yang terdiri dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial (*Global Reporting Standard 2017*). Sedangkan GRI sendiri merupakan organisasi Internasional yang membantu perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan cara

membuat standar pelaporan secara umum untuk melaporkannya. Mempersiapkan laporan sesuai dengan standar GRI memastikan bahwa laporan tersebut memberikan gambaran yang lengkap dan akurat mengenai isu-isu utama organisasi dan dampak terkait, dan bagaimana dampak tersebut dikelola (Hidayat et al., 2022).



**Gambar 1.2 Grafik rata-rata pengungkapan CSR Perusahaan BUMN 2018-2022**

*Sumber : Hasil Data Oleh Peneliti (2024)*

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2018 rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN sebesar 0,42757 yang artinya 63 dari 149 poin *GRI Standards*. Selanjutnya, tahun 2019 rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 0,47403 yang artinya 70 dari 149 poin *GRI Standards*. Tahun 2020 rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 0,507969 yang artinya 75 dari 149 poin *GRI Standards*.. Tahun 2021 rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 0,53985 yang artinya 80 dari 149 poin *GRI Standards*. Dan yang terakhir tahun 2022 rata-rata pengungkapan *corporate social responsibility* sebesar 0,68792 yang artinya 103 dari 149 poin *GRI Standards*. Dengan diperolehnya rata-rata pengungkapan CSR yang pada perusahaan BUMN terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan BUMN terus berupaya dalam peningkatan kepeduliannya terhadap Masyarakat dan lingkungan sekitar dari aktifitas perusahaannya.

Menurut Rusdiono (2013) dalam penelitiannya Hidayat et al. (2022) tingkat persentase perhitungan dari pengungkapan CSR sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Tingkat Persentase Perhitungan Pengungkapan CSR**

1.	0%	<i>Not Applied</i>
2.	1% - 40%	<i>Limited Disclosure</i>
3.	41% - 75%	<i>Partially Applied</i>
4.	76% - 99 %	<i>Well Applied</i>
5.	100%	<i>Fully Applied</i>

*Sumber : Rusdiono (2013) dalam penelitian (Hidayat et al., 2022)*

Berdasarkan rata-rata diatas, pengungkapan *corporate social responsibility* selama periode 2018-2022 berada di angka 0,50 atau 50%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN termasuk kedalam *partially applied*. Artinya perusahaan BUMN hanya menerapkan dan mengungkapkan sebagian dari *GRI Standards* yang sudah ditentukan. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya perhatian dari perusahaan BUMN dalam pengungkapan *corporate social responsibility*.

**Tabel 1. 3 Rata-rata Pengungkapan CSR Berdasarkan Aspek**

Rata-Rata Pengungkapan Berdasarkan Aspek	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
Sektor Energi, Minyak, dan Gas	0.5	0.52	0.47
Sektor Industri Pangan dan Pupuk	0.76	0.91	0.67
Sektor Jasa Infrastruktur	0.38	0.32	0.35
Sektor Jasa Keuangan	0.44	0.27	0.32
Sektor Jasa Logistik	0.31	0.42	0.5
Sektor Jasa Pariwisata dan Pendukung	0.29	0.29	0.45

*Sumber : Hasil Data Oleh Peneliti (2024)*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa sektor energi, minyak, dan gas memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 0,5 pada aspek ekonomi, 0,52 pada aspek lingkungan, dan pada aspek sosial sebesar 0,47. Dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di sektor energi, minyak, dan gas adalah PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Pertamina. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor energi, minyak, dan gas cenderung mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek lingkungan.

Selanjutnya pada sektor pangan dan pupuk memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 0,76 pada aspek ekonomi, 0,91 pada aspek lingkungan, dan pada aspek sosial sebesar 0,67. Dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di sektor energi, minyak, dan gas adalah PT Pupuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor energi, minyak, dan gas cenderung mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek ekonomi. Pada sektor jasa infrastruktur memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 0,38 pada aspek ekonomi, 0,32 pada aspek lingkungan, dan pada aspek sosial sebesar 0,35. Dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di sektor jasa infrastruktur adalah Perum Perumnas, PT Adhi Karya, PT Semen Indonesia Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor energi, minyak, dan gas cenderung mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek ekonomi.

Pada sektor jasa keuangan memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 0,44 pada aspek ekonomi, 0,27 pada aspek lingkungan, dan pada aspek sosial sebesar 0,32. Dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di sektor jasa keuangan adalah PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Tabungan Negara, dan PT Bank Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor jasa keuangan cenderung mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek ekonomi. Kemudian pada sektor jasa logistik memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 0,35 pada aspek ekonomi, 0,41 pada aspek lingkungan, dan pada aspek sosial sebesar 0,5. Dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di sektor jasa logistik adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor jasa logistik cenderung mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek sosial.

Dan yang terakhir pada sektor jasa pariwisata dan pendukung rata-rata pengungkapan sebesar 0,29 pada aspek ekonomi, 0,29 pada aspek lingkungan, dan pada aspek sosial sebesar 0,45. Dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di sektor jasa pariwisata dan pendukung adalah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan



Navigasi Penerbangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor jasa pariwisata dan pendukung cenderung mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek sosial. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada perusahaan BUMN dimasing-masing sektor mengungkapkan pengungkapan *corporate social responsibility* pada aspek yang beragam, Hal ini menunjukkan bahwa adanya keberagaman disetiap sektor dalam pengukapan aspeknya.

Menurut Freeman & Dmyriyev (2017) dalam penelitian Islami & Sudarma (2022) kepentingan masyarakat dalam bisnis perusahaan ditekankan pada teori *stakeholder* karena antara bisnis dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari kegiatan CSR tersebut merupakan bentuk dari kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan para *stakeholder*. Menurut Hadi (2011:94) dalam penelitian Putri & Yuliandhari (2020). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pemangku kepentingan yang berkaitan atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan, maka lahirlah konsep CSR yang artinya perusahaan tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial sekitarnya. Sehingga mengungkapkan tanggung jawab sosial dapat membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan dampak terhadap pengungkapan CSR adalah *slack resources*. Menurut Bourgeois (1981) dalam penelitian Melvin & Rachmawati (2021) *slack resources* adalah kelebihan sumber daya yang digunakan perusahaan untuk menghadapi kondisi tidak terduga baik dari internal maupun eksternal. Terdapat beberapa fungsi *slack resources* bagi perusahaan yaitu sebagai alat penyelesaian konflik, sebagai dorongan agar pelaku organisasi tetap berada dalam sistem, serta sebagai fasilitator perilaku strategis dalam perusahaan (Fahreza & Inawati, 2023). Menurut Nazar & Istiqomah (2023) Pengukuran yang tepat untuk *slack resources* menggunakan nilai kas dan setara kas yang artinya nilai kas dan setara kas di ubah menjadi logaritma natural kas dan setara kas agar terhindar dari data yang bersifat *outlier*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nazar & Istiqomah (2023) yang menyatakan bahwa *slack resources* berpengaruh positif terhadap pengungkapan

*corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariz Fahreza & Inawati (2023) yang menyatakan bahwa *slack resources* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian terdahulu ini membuktikan adanya inkonsistensi hubungan antara *slack resources* dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena itu peneliti memilih *slack resources* sebagai variabel pertama dalam penelitian ini.

Dewan Komisaris juga menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan dampak terhadap pengungkapan CSR. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan nasihat serta bimbingan kepada direksi atau pengurus perusahaan (Restu et al., 2017). Menurut Rivandi et al. (2019) Dewan Komisaris dan jajarannya bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas penerapan tata kelola, termasuk permasalahannya pelaksanaan pekerjaan sosial dengan orang yang berbeda. Penerapan CSR merupakan prinsip penerapan tata kelola perusahaan, sehingga perusahaan yang menerapkannya wajib melaksanakan CSR. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al. (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhaimi & Nuraprianti (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Namun, dalam penelitian Rivandi et al. (2019) dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian terdahulu ini membuktikan adanya inkonsistensi hubungan antara dewan komisaris dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena itu peneliti memilih dewan komisaris sebagai variabel kedua dalam penelitian ini.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan dampak terhadap pengungkapan CSR (Dewi & Khafi, 2018). Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai seberapa besar atau kecil suatu bisnis ditinjau dari ukurannya yang dapat diukur dengan berbagai cara, baik dari segi total aset, rata-rata penjualan, dan nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Dewi & Khafi (2018) perusahaan besar cenderung memiliki kegiatan yang semakin sulit, sehingga penerapan CSR dapat

digunakan untuk memandu perusahaan agar terhindar dari risiko-risiko tersebut di kemudian hari. Hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial juga mendapatkan hasil yang berbeda-beda (Yanti et al., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Khafi (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhaimi & Nuraprianti (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian terdahulu ini membuktikan adanya inkonsistensi hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility*. Karena itu peneliti memilih ukuran perusahaan sebagai variabel ketiga dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masih ditemukannya inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya antara variabel independent terhadap pengungkapan CSR dan masih adanya perusahaan BUMN yang belum melakukan pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN periode 2018-2022. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Slack Resources*, Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi pada Perusahaan BUMN periode 2018-2022).**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan karena telah diatur dalam Undang-Undang. Bukan hanya untuk mempertahankan perusahaan namun juga agar mendapatkan pandangan baik dari masyarakat sekitar. Laporan keberlanjutan pada dasarnya sangat penting bagi perusahaan. Namun, masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan pengungkapan dari laporan keberlanjutan.

Dari fenomena yang sudah dijelaskan, masih adanya beberapa Perusahaan yang kurang memerhatikan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan *corporate social responsibility* yang tidak dilaporkan secara

keseluruhan sesuai dengan kaidah dari *GRI Standards*. Pemerintah sudah berupaya untuk mendorong para Perusahaan untuk berlomba-lomba dalam kepedulian sosial untuk meningkatkan citra dari pada Perusahaan itu sendiri. Namun, usaha itu juga masih kurang untuk mendorong perusahaan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* secara keseluruhan.

Beberapa hal menjadi faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility* diantaranya adalah *slack resources*, dewan komisaris, dan ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini menggunakan Perusahaan BUMN periode 2018-2022 sebagai objek.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menghasilkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *slack resources*, dewan komisaris, ukuran perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022?
2. Apakah *slack resources*, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022?
3. Apakah *slack resources* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022?
4. Apakah dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *slack resources*, dewan komisaris, ukuran perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simultan antara *slack resources*, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif secara parsial dari *slack resources* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan BUMN periode 2018-2022.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Manfaat teoritis dari pengembangan pengetahuan terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta informasi mengenai *slack resources*, dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *slack resources*, dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memotivasi dan mengevaluasi hasil kinerja dan juga dapat menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam memilih perusahaan dalam berinvestasi dengan memperhatikan beberapa poin

seperti *slack resources*, dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memperhatikan perusahaan-perusahaan BUMN terutama pada *slack resources*, dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika ini disusun untuk memberikan gambaran penulisan tugas akhir mengenai pengaruh *slack resources*, dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap *corporate social responsibility*. Sistematika ini berisikan mengenai materi dan hal-hal yang dibahas pada setiap bab. Sistematika pada penulisan tugas akhir ini terbagi sebagai berikut:

#### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang didukung oleh fenomena yang didasarkan oleh argumentasi teoritis serta data, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

#### **B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu sebagai bahan referensi, pengembangan kerangka pemikiran menjadi hipotesis, dan ruang lingkup penelitian.

#### **C. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, variabel independent dan variabel dependen yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

**D. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik data, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan hasil dari hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

**E. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian serta saran yang dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**